

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikasi Korupsi di Indonesia

Factors that Affecting the Corruption Indication in Indonesia

Newin Ananta Aji Saputra dan Doddy Setiawan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
newinananta@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and obtain empirical evidence whether fiscal decentralization, political affiliation, political dynasties and accountability can influence indications of corruption in districts / cities in Indonesia. This research is motivated by the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) for the examination of Local Government Financial Statements (LKPD) from 2013 to 2015 that indications of corruption by the number of cases non-compliance of 9,853 and number of corruption indications of Rp 11.827 billion. This research is a quantitative descriptive research with hypothesis testing and multiple linear regression analysis. The population in this study is 1.473 LKPD year 2013 - 2015 which has been audited by BPK from 491 districts / cities in Indonesia. The sample is obtained by purposive sampling method with the number of 1,137 LKPD from 379 districts / cities in Indonesia. Indications of corruption are measured by the findings of the State Audit Board for non-compliance with laws and regulations that result in regional losses, potential regional losses and lack of revenues. The results of this study prove that fiscal decentralization has a positive effect on the indication of corruption. Political affiliation has no effect on indications of corruption. Political dynasty positively affects indications of corruption. Accountability negatively affects the indications of corruption.

Keyword: *political affiliation, accountability, fiscal decentralization, political dynasty, corruption indication*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia dimulai sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan selain beberapa bidang tertentu yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Namun demikian, pada praktiknya selain distribusi pelayanan kepada masyarakat ternyata otonomi daerah juga menyebabkan korupsi ikut terdistribusi ke daerah. Kebijakan otonomi dan desentralisasi memberikan kebebasan yang lebih kepada daerah yang berimplikasi terhadap adanya kesempatan untuk korupsi. Otonomi dan desentralisasi memunculkan kekuatan kejahatan institusional, yaitu eksekutif dan legislatif melakukan korupsi secara bersama-sama (Sudana, 2006).

Data dari KPK pada tahun 2016 sebanyak 10 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 7 kepala daerah tersangkut kasus yang sama. Sejak KPK berdiri dari tahun 2004 hingga juni 2017 ada 78 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi (Kompas.com, 3 Februari 2018). Kasus korupsi kepala daerah sepertinya belum akan mereda, pada awal 2018 sudah 7 kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK (Kompas.com, 8 maret 2018). Rinaldi et.al. (2007) menyatakan bahwa korupsi selalu mengikuti dan membayangi kemanapun kekuasaan

ada, dimana ada kekuasaan disitu ada korupsi.

Berdasarkan hasil temuan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdapat permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan yang ditengarai sebagai indikasi korupsi terhadap pengelolaan APBD. Berdasarkan temuan tersebut pada tahun 2013 terdapat 3.657 kasus dengan tren yang terus meningkat tiap tahun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 3.784 kasus. Jumlah indikasi korupsi tahun 2013 adalah Rp 4 milyar sedangkan total indikasi korupsi dari tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah Rp 11.827.817.660,00. Temuan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan LKPD tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian Daerah	Potensi Keugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Jumlah
2013	3.657	982.461.780,00	2.636.661.010,00	393.188.790,00	4.012.311.580,00
2014	2.422	1.421.322.180,00	1.410.191.670,00	373.706.130,00	3.205.219.980,00
2015	3.647	1.174.893.360,00	538.889.230,00	809.013.510,00	2.522.796.100,00
2016	3.784	1.130.170.000,00	419.600.000,00	537.720.000,00	2.087.490.000,00
Jumlah	9.853	4.708.847.320,00	5.005.341.910,00	2.113.628.430,00	11.827.817.660,00

Sumber : IHPS BPK RI Tahun 2013-2016

Korupsi pada sektor publik akan merugikan keuangan daerah dan menghambat distribusi pelayanan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Treisman (2000) dan Huther dan Shah dalam Gatti (1999) menunjukkan bahwa desentralisasi berbanding lurus dengan korupsi. Dalam mendefinisikan korupsi, Robert Klitgaard (2005) memberikan rumusan yang dikenal sebagai teori CDMA yaitu Korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas. Klitgaard menyatakan bahwa ada hubungan antara korupsi dengan pemusatan dan monopoli kewenangan. Maksudnya, korupsi dapat terjadi jika terdapat kekuasaan yang dimonopoli oleh seseorang dengan kewenangan yang berlebihan. Hal itu juga didukung tidak adanya pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang baik. Ketiga kombinasi tersebut membuat korupsi sangat mungkin terjadi di suatu organisasi.

Lord Acton (1887) mengatakan bahwa "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut sudah pasti korup." Kata-kata ini di kemudian hari menjadi diktum yang masyhur di dalam politik. Di Indonesia sendiri diktum tersebut bisa dilihat dari adanya monopoli politik. Monopoli politik yang dimaksud terjadi ketika partai pendukung Bupati/Walikota di suatu daerah memiliki persentase perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang besar di Kabupaten/Kota tersebut. Tanzi (2002)

menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab langsung dari korupsi adalah adanya kewajiban kepala daerah sebagai anggota/ pihak yang didukung oleh partai politik untuk membiayai partai politik. Selain hal tersebut monopoli politik juga bisa dilihat dengan adanya politik dinasti di beberapa daerah.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi adanya politik dinasti yaitu dengan diberlakukannya model pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun pilkada langsung juga menimbulkan masalah baru yaitu melonjaknya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaannya baik dari pemerintah maupun calon kepala daerah. Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan bahwa tingginya biaya politik meningkatkan resiko kepala daerah untuk melakukan korupsi (kompas.com, diakses 6 februari 2018). Senada dengan KPK, Sekjen PAN juga mengatakan bahwa kepala daerah korupsi karena tingginya biaya politik (tribunnews.com, diakses 8 februari 2018).

Robert Klitgaard menyatakan dalam teori CDMA nya salah satu hal yang bisa dilakukan dalam mengurangi korupsi adalah dengan meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban yang berupa pelaporan atas kinerja pemerintah daerah. Dengan akuntabilitas diharapkan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan daerah atau korupsi akan menurun.

Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap korupsi telah dilakukan oleh Lederman (2001). Hasil penelitian tersebut adalah akuntabilitas yang diwakili oleh struktur pemerintahan presidensial, demokrasi, stabilitas demokrasi dan kebebasan pers mempunyai pengaruh negatif terhadap korupsi. Olken (2007) dalam penelitiannya di Indonesia menyatakan bahwa kegiatan pengawasan dalam bentuk audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) efektif terhadap penurunan korupsi di suatu daerah.

Penelitian tentang indikasi korupsi sudah beberapa kali dilakukan para peneliti baik dari luar negeri maupun dalam negeri namun hasilnya masih cukup ambigu. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang determinan indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian tentang indikasi korupsi sangat penting karena terjadinya indikasi korupsi dapat berpotensi menjadi kasus korupsi yang berkekuatan hukum dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Penelitian terkait korupsi di lingkungan pemerintah daerah telah banyak dilakukan sebelumnya baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Penelitian di luar negeri antara lain dilakukan oleh Lederman (2001), Fisman dan Gatti (2002), Tumennasan (2005), Gurgur dan Shah (2005), Treisman (2000). Penelitian dari dalam negeri antara lain oleh Setiawan (2012), Kurniawati (2017), Nur (2015), Kurniawan (2017) dan Nurcholis (2016). Sebagaimana penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berisi pengujian terkait korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud adalah penelitian ini menggunakan Teori Korupsi Klitgaard (Teori CDMA) sebagai dasar pemikiran. Dalam teorinya, Klitgaard menggambarkan korupsi dengan sebuah formula, yaitu $Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability$. Peneliti menurunkan satu variabel terikat dan 4 variabel bebas dari formula dalam teori tersebut. Variabel terikat yang dimaksud adalah indikasi korupsi pemerintah daerah, sedangkan variabel bebas terdiri atas diskresi pemerintah daerah, afiliasi politik, dinasti politik, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Perbedaan kedua dalam penelitian ini digunakan LHP BPK tahun 2013-2015, Laporan Hasil Pemilu Legislatif 2014, Laporan Hasil Pemilu Kepala Daerah 2015 dan Hasil Penilaian AKIP oleh Kemenpan-RB tahun 2013-2015 sebagai sumber data. Ketiga karena

Penelitian ini menggunakan tingkat ekonomi dan tahun politik sebagai variabel kontrol untuk diuji pengaruhnya terhadap korupsi pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Korupsi Klitgaard (Teori CDMA)

Robert Klitgaard (2005) menyatakan bahwa korupsi memiliki korelasi sistemik dengan pemusatan dan monopoli kewenangan. Rumusnya adalah $C = D + M - A$, dengan rincian *Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability*. Maksudnya, korupsi dapat terjadi jika terdapat monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dengan kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan tanpa disertai adanya pertanggungjawaban yang memadai. Ketiga kombinasi tersebut membuat korupsi sangat mungkin terjadi di suatu organisasi.

Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk memenuhi keuntungan pribadinya (Tuana Kotta, 2010). Chetwynd (2003) menyatakan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan unilateral yang dilakukan oleh pejabat pemerintah seperti nepotisme, penggelapan dan penyalahgunaan yang menghubungkan pejabat publik dan pihak swasta, seperti pemerasan, penyipuan dan penipuan. Pengertian yang dikeluarkan *Transparency International* Indonesia (TII, 2006) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Desentralisasi Fiskal (Diskresi)

Struktur pemerintahan diskresi dapat dilihat dari kewenangan pemerintah daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan pemerintahan. Kewenangan pemerintah daerah didapatkan dari adanya peralihan kekuasaan dari sentralistik menjadi desentralistik. Sebagaimana dikemukakan oleh Agrawal dan Ribot (2002), desentralisasi didefinisikan sebagai berbagai aksi dari pemerintah pusat yang secara formal memberikan kewenangan kepada pelaku dan institusi di tingkat yang lebih rendah dalam hal administrasi politik dan hirarki wilayah. Melimpahkan kekuasaan kepada level yang lebih rendah melibatkan penciptaan domain pembuatan keputusan dalam berbagai pelaku pada tingkat yang lebih rendah yang bisa melaksanakan beberapa otonomi.

Monopoli Politik

Lord Acton (1887) mengatakan bahwa "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak sudah pasti korup". Mosca dalam karyanya *The Rulling Class* yang dikutip oleh Sastroatmodjo dalam *Perilaku Politik* (1995) menyatakan: "Terdapat dua kelas penduduk dalam setiap masyarakat. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi kekuasaan dan melakukan monopoli. Setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi turun temurun, terutama ketika posisi politik yang terbuka untuk semua. Politik dinasti adalah politik berbasis kekerabatan. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Akuntabilitas

Konsep utama akuntabilitas adalah *agent* yang mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan serta tindakannya pada *principal* (Trippet dan Kluvers, 2010). Menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah wujud pertanggungjawaban

instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pengaruh Diskresi terhadap Indikasi Korupsi Pemerintah Daerah

Teori Klitgaard, kebebasan bertindak pemerintah (diskresi) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah. Dalam struktur pemerintahan diskresi dapat dilihat dari kewenangan pemerintah daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan pemerintahan. Kewenangan pemerintah daerah didapatkan dari adanya peralihan kekuasaan dari sentralistik menjadi desentralistik.

Hasil penelitian Fisman dan Gatti (2002), Tumennasan (2005) dan Gurgun dan Shah (2005) menemukan bahwa desentralisasi dapat memperkecil korupsi. Sebaliknya hasil penelitian Treisman (2000), Gerring dan Thacker (2005), Kurnicova dan Rose Ackerman (2005) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan korupsi. Perbedaan hasil tersebut dikarenakan tingkat kesiapan pemerintah daerah dan karakteristik pengimplementasian desentralisasi di tiap negara berbeda. Perbedaan karakteristik ini akan berpengaruh pada fenomena korupsi pada masing-masing negara. Pada keadaan normal, diskresi/ desentralisasi fiskal akan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi di suatu pemerintahan daerah. Dengan adanya diskresi yang berlebihan, peluang terjadinya tindak pidana korupsi menjadi sangat tinggi. Maka dari itu, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : diskresi berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pengaruh Afiliasi Partai Politik terhadap Indikasi Korupsi Pemerintah Daerah

Robert Klitgaard menyatakan bahwa monopoli politik juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah. Rumesten (2014) dalam penelitiannya menghasilkan simpulan bahwa monopoli politik pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap korupsi. Penelitian dari Karlström (2015) dan Lederman (2005) juga menunjukkan bahwa monopoli politik berpengaruh terhadap korupsi. Tindak pidana korupsi akan lebih mudah dilakukan di suatu pemerintahan daerah dengan tingkat monopoli politik yang tinggi. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_2 : afiliasi partai politik berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pengaruh Dinasti Politik terhadap Indikasi Korupsi Pemerintah Daerah

Dinasti politik adalah fenomena umum dan telah lama hadir di banyak negara demokrasi modern. Hasil pemilihan paruh waktu (*mid-term elections*) Filipina tahun 2013 menunjukkan, dari 80 provinsi yang "dikotori" keluarga politik (*political families*), 74 persen anggota DPR terpilih berasal dari kelompok dinasti tersebut (Tadem, 2016). Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa dinasti politik semakin membuka peluang dan memperbesar potensi terjadinya korupsi (kpk.go.id, diakses 7 maret 2018). Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : dinasti politik berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori korupsi yang dicetuskan oleh Robert Klitgaard, akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah. Javaid (2010) dalam penelitiannya di Pakistan menyatakan bahwa sebesar 31,68% korupsi yang terjadi di Pakistan disebabkan lemahnya akuntabilitas. Penelitian Kaufmann(2005), Olken (2007), Brewer (2007), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap korupsi. Fitriana (2017) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi indikasi korupsi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif dari akuntabilitas pemerintah daerah terhadap korupsi. Akuntabilitas berbanding terbalik dengan tingkat korupsi. Pada kondisi ideal, semakin rendah akuntabilitas, maka tingkat korupsi di suatu pemerintahan daerah akan semakin tinggi. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Penelitian ini adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang dilaksanakan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh desentralisasi fiskal (diskresi) pemerintah daerah, afiliasi partai politik, dinasti politik dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap indikasi korupsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 1.473 LKPD tahun 2013 - 2015 yang berasal dari 491 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya untuk tahun 2013-2015 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terdapat temuan kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat data hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB. Sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria tersebut terdiri dari 1.137 LKPD yang berasal dari 379 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Berikut adalah data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: (1) Data indikasi korupsi diperoleh dari temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kriteria ini berdasarkan pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor

5/K/I.XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan yang mengindikasikan adanya kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan negara. (2) Data Diskresi/Desentralisasi fiskal diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada bagian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2013-2015. (3) Data afiliasi partai politik diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum yang dapat diakses melalui <http://www.kpu.go.id/> dan dari puskapol.ui.ac.id. (4) Data Dinasti politik diperoleh dari *Press Release* Koalisi Pilkada Bersih (PUKAT UGM, PUSAKO UNAND, ICW, PERLUDEM, LINGKAR MADANI), Media Online Kompas.com, liputan6.com. (5) Data Akuntabilitas diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013-2015 oleh KemenPAN-RB yang dapat diakses melalui <https://menpan.go.id/site/>. (6) Data tingkat ekonomi diperoleh dari diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang dapat diakses melalui www.bps.go.id untuk mengetahui seberapa besar tingkat ekonomi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. (7) Data tahun politik diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum yang dapat diakses melalui <http://www.kpu.go.id/>.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menurunkan teori Klitgaard ke dalam variabel independen dan variabel dependen. Dari teori korupsi Klitgaard, peneliti menurunkan satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen yang dimaksud adalah indikasi korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Keempat variabel independen pada penelitian ini yaitu diskresi/desentralisasi fiskal pemerintah daerah, afiliasi partai politik, dinasti politik dan akuntabilitas pemerintah daerah. Selain variabel independen dan variabel dependen di atas, penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol yaitu tingkat ekonomi dan tahun politik.

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah indikasi korupsi pemerintah Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (INKORUP). Indikasi korupsi dalam penelitian ini diukur dengan jumlah rupiah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan penelitian Arifin, et al.(2013) dan Fitriana (2017). Kriteria ini didasarkan pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I.XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Koding Temuan Pemeriksaan yang mengindikasikan adanya kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan negara.

Variabel Independen

Penelitian ini desentralisasi fiskal diproksikan dengan rasio yang membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan (PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak), DAU, DAK) terhadap total belanja selama satu tahun anggaran. Penggunaan variabel ini mengacu pada Zhang dan Zou (1998) dan Fitriana (2017). Tanzi (2002) mengatakan bahwa korupsi disebabkan oleh monopoli dan diskresi kekuasaan. Korupsi akan lebih mudah dilakukan di suatu pemerintahan daerah dengan tingkat monopoli politik yang tinggi. Pada penelitian ini, afiliasi partai politik diukur dengan prosentase jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik pengusung bupati/walikota pada tahun 2013-2015.

Politik dinasti adalah politik berbasis kekerabatan. Dinasti politik adalah fenomena yang telah lama hadir di banyak negara demokrasi modern. Pada penelitian ini, dinasti

politik diukur dengan data *dummy* berdasarkan data dari *Press Release* Koalisi Pilkada Bersih (PUKAT UGM, PUSAKO UNAND, ICW, PERLUDEM, LINGKAR MADANI), kompas.com dan liputan6.com, daerah yang diketahui memiliki kepala daerah dari dinasti politik maka diberikan nilai 1, sedangkan yang tidak diberi nilai 0. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban yang berupa pelaporan atas kinerja pemerintah daerah. Pada penelitian ini, akuntabilitas diukur dengan nilai skor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2013-2015 yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB.

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu tingkat ekonomi dan tahun pilkada dengan penjelasan sebagai berikut : Tingkat ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat kemapanan ekonomi suatu daerah. Tingkat ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten/Kota dalam bentuk logaritma natural jumlah nominal (rupiah). Tahun politik pada penelitian ini diartikan sebagai tahun dimana diselenggarakannya pemilihan kepala daerah pada Kabupaten/Kota tersebut. Pada penelitian ini, tahun politik diukur dengan data *dummy* berdasarkan data dari KPU, daerah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun tersebut diberikan nilai 1, sedangkan yang tidak diberi nilai 0.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah menggunakan data panel dan analisis datanya menggunakan regresi berganda data panel. Data panel adalah gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Dalam analisis regresi data panel, penelitian ini akan menggunakan *software evIEWS 9*. Tujuan analisis regresi adalah untuk melakukan pendugaan dan menguji pengaruh antara variabel dependen dan independen (Djarwanto, 2001). Pendugaan dalam penelitian ini digambarkan dalam persamaan regresi berikut ini:

$$\text{LnKORUP} = \alpha + \beta_1 \text{DEST} + \beta_2 \text{AFPOL} + \beta_3 \text{DINPOL} + \beta_5 \text{AKUN} + \beta_7 \text{EKONOMI} + \beta_4 \text{YEARPOL} + \varepsilon$$

Keterangan :

LnKORUP = Log NaturalIndikasi Korupsi

DEST = Desentralisasi

AFPOL = Afiliasi Partai Politik

DINPOL = Dinasti Politik

AKUN = Akuntabilitas

EKONOMI = Tingkat Ekonomi Pemerintah Daerah

YEARPOL = Tahun Politik

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini merupakan pengujian statistik secara umum yang bertujuan untuk melihat distribusi data dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Ukuran yang digunakan dalam penelitian adalah nilai minimum, maksimum, nilai rerata/*mean* dan standar deviasi. Statistik deskriptif penelitian ini disajikan pada tabel 2 :

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Dev.
KD	2.470.000,00	29.159.560.000,00	1.976.138.000,00	3.231.918.000,00
PKD	1.320.000,00	257.910.400.000,00	6.394.656.000,00	24.102.700.000,00
KP	540.000,00	29.061.100.000,00	1.009.368.000,00	2.534.437.000,00
INKORUP	580.000,00	289.126.400.000,00	4.568.198.000,00	15.970.710.000,00
DEST	0,000858	1,817949	0,85449	0,120791
AKUN	15,33	80,22	45,97583	9,708224

Sumber: hasil olahan data panel

Keterangan : KD = Kerugian Daerah; KP = Kekurangan Penerimaan; PKD = Potensi Kerugian Daerah; INKORUP = Indikasi Korupsi; DEST = Desentralisasi Fiskal; AKUN = Akuntabilitas

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kerugian daerah sebesar 1.976.138.000,00 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.231.918.000,00. Nilai minimum kerugian daerah sebesar 2.470.000,00 ada pada Kabupaten Toraja Utara tahun 2014 dan nilai maksimumnya 29.159.560.000,00 ada pada Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2013. Nilai rata-rata potensi kerugian daerah sebesar 6.394.656.000,00 dengan nilai standar deviasi sebesar 24.102.700.000,00. Nilai minimum potensi kerugian daerah sebesar 1.320.000,00 ada pada Kabupaten Jeneponto tahun 2014 dan nilai maksimumnya 257.910.400.000,00 ada pada Kabupaten Siak tahun 2014.

Nilai rata-rata kekurangan penerimaan sebesar 1.009.368.000,00 dengan nilai standar deviasi sebesar 2.534.437.000,00. Nilai minimum kekurangan penerimaan sebesar 540.000,00 ada pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2014 dan nilai maksimumnya 29.061.100.000,00 ada pada Kabupaten Siak tahun 2014. Nilai rata-rata indikasi korupsi sebesar 4.568.198.000,00 dengan nilai standar deviasi sebesar 15.970.710.000,00. Nilai minimum indikasi korupsi sebesar 580.000,00 ada pada

Kabupaten Jembrana tahun 2014 dan nilai maksimumnya 289.126.400.000,00 ada pada Kabupaten Siak tahun 2014.

Nilai rata-rata desentralisasi fiskal sebesar 0,85449 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,120791. Nilai minimum desentralisasi fiskal sebesar 0,000858 ada pada Kota Bengkulu tahun 2014 dan nilai maksimumnya 1,817949 ada pada Kabupaten Lombok Timur tahun 2015. Nilai rata-rata akuntabilitas sebesar 45,97583 dengan nilai standar deviasi sebesar 9,708224. Nilai minimum akuntabilitas sebesar 15,33 ada pada Kabupaten Jayawijaya tahun 2014 dan nilai maksimumnya 80,22 ada pada Kota Bandung tahun 2015.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara bivariat. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan hasil sebagai berikut :

Desentralisasi fiskal berhubungan positif dan signifikan dengan indikasi korupsi dengan nilai $r=1,818$ dan $p=0,069$ ($p<0,10$). Afiliasi politik berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap indikasi korupsi dengan nilai $r=0,518$ dan $p=0,604$ ($p>0,05$). Dinasti politik berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap indikasi korupsi dengan nilai $r=1,519$ dan $p=0,129$ ($p>0,05$). Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi korupsi dengan nilai $r=-3,694$ dan $p=0,000$ ($p<0,05$). Tingkat ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi korupsi dengan nilai $r=3,929$ dan $p=0,000$ ($p<0,05$). Tahun politik tidak berhubungan positif dengan indikasi korupsi dengan nilai $r=-1.433$ dan $p=0.152$ ($p>0,05$). Berdasarkan uraian diatas, secara lengkap hasil analisis korelasi akan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Uji Korelasi

Korelasi	Indikasi Korupsi	Desentralisasi Fiskal	Afiliasi Politik	Dinasti Politik	Akuntabilitas	Tingkat Ekonomi	Tahun Politik
Indikasi Korupsi	-----						
Desentralisasi Fiskal	1.818285	-----					
	0.0693	-----					
Afiliasi Politik	0.518589	-1.581420	-----				
	0.6042	0.1141	-----				
Dinasti Politik	1.519178	-2.570095	3.789389	-----			
	0.1290	0.0103	0.0002	-----			
Akuntabilitas	-3.694783	-6.928510	1.893626	2.744205	-----		
	0.0002	0.0000	0.0585	0.0062	-----		
Tingkat Ekonomi	3.929117	0.137350	1.354496	-1.697562	3.322010	-----	
	0.0001	0.8908	0.1759	0.0899	0.0009	-----	
Tahun Politik	-1.433617	-1.396067	-1.990990	-1.160672	-0.019156	1.597187	-----
	0.1520	0.1630	0.0467	0.2460	0.9847	0.1105	-----

Sumber : Hasil olah data

Uji Hipotesis

Sebelum melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini sudah dilakukan pemilihan model penelitian. Model yang digunakan dalam pengujian adalah random effect. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji koefisien determinasi (R²), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji koefisien regresi parsial (uji signifikansi-t). Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menguji tentang pengaruh desentralisasi fiskal, afiliasi politik, dinasti politik dan akuntabilitas terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Uji Hipotesis

Variable	Indikasi Korupsi	KD	PKD	KP
A	3,029	2,889	2,053	2,555
Desentralisasi Fiskal	0,314***	0,168**	0,710***	-0,217**
	(0,017)	(0,059)	(0,015)	(0,035)
Afiliasi Politik	0,001	0,001**	0,002	-0,001
	(0,221)	(0,049)	(0,163)	(0,203)
Dinasti Politik	0,114**	0,151*	-0,024	0,015
	(0,049)	(0,092)	(0,360)	(0,428)
Akuntabilitas	-0,005***	-0,006***	0,000	-0,003***
	(0,000)	(0,002)	(0,410)	(0,000)
Tingkat Ekonomi	0,002***	0,001***	0,003***	0,003***
	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)
Tahun Politik	-0,059***	0,019	-0,276***	0,026
	(0,000)	(0,297)	(0,000)	(0,560)
F-Test	4,997	4,297	3,489	3,374
Prob	0,000	0,000	0,002	0,003
Ajusted R ²	0,022	0,018	0,033	0,016
Observasi (N)	1.086	1.051	433	859

Keterangan : KD = Kerugian Daerah; KP = Kekurangan Penerimaan; PKD = Potensi Kerugian Daerah

Desentralisasi Fiskal = (PAD+Dana Perimbangan)/(Total Belanja)

Afiliasi Politik = prosentase jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik pengusung bupati/walikota pada tahun 2013 - 2015

Dinasti Politik = variabel *dummy*, angka 1 untuk daerah yang terdapat dinasti politik, angka 0 untuk yang tidak

Akuntabilitas = Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2013-2015 oleh KemenPAN-RB

Tingkat Ekonomi = Jumlah PDRB per kapita

Tahun Politik = variabel *dummy*, angka 1 untuk tahun diselenggarakannya pilkada, 0 untuk yang tidak

Indeks Pembangunan Manusia = Skor dari Badan Pusat Statistik

Ukuran Pemda = Total Aset Pemerintah Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada bagian Neraca.

Ket: *,**,*** Signifikan pada 10%, 5%, 1%

Tabel 5 indikasi korupsi di Indonesia memiliki nilai adjusted R^2 sebesar 0,022. Hal ini menunjukkan 2,2% indikasi korupsi dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal, afiliasi politik, dinasti politik, akuntabilitas, tingkat ekonomi, dan tahun politik. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian. Berdasarkan hasil uji regresi Indikasi Korupsi pada tabel diatas diperoleh F hitung sebesar 4,997 dengan nilai probabilitas 0,000 ($p < 0,05$) yang mengindikasikan signifikansi dengan tingkat keyakinan 1 %. Hal ini berarti bahwa desentralisasi fiskal, afiliasi politik, dinasti politik, akuntabilitas, tingkat ekonomi, tahun politik secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indikasi korupsi.

Uji koefisien regresi parsial (Uji - t) diperoleh variabel desentralisasi mempunyai nilai koefisien 0,314 dan nilai signifikansi sebesar 0,017. Koefisien bertanda positif artinya semakin besar desentralisasi maka akan semakin besar indikasi korupsi demikian sebaliknya semakin kecil desentralisasi maka semakin kecil pula indikasi korupsi. Variabel afiliasi politik mempunyai nilai koefisien 0,001 dan nilai signifikansi sebesar 0,221. Variabel dinasti politik mempunyai nilai koefisien 0,114 dan nilai signifikansi sebesar 0,049. Koefisien bertanda positif artinya semakin besar dinasti politik maka akan semakin besar indikasi korupsi demikian pula sebaliknya, semakin kecil dinasti politik maka semakin kecil indikasi korupsi. Variabel akuntabilitas mempunyai nilai koefisien -0,005 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien bertanda negatif artinya semakin besar akuntabilitas maka akan semakin kecil indikasi korupsi demikian pula sebaliknya, semakin kecil akuntabilitas maka semakin besar indikasi korupsi.

Variabel tingkat ekonomi mempunyai nilai koefisien 0,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien bertanda positif artinya semakin tinggi tingkat ekonomi maka akan semakin tinggi pula indikasi korupsi demikian pula sebaliknya semakin rendah tingkat ekonomi maka semakin rendah pula indikasi korupsi. Variabel tahun politik mempunyai nilai koefisien -0,059 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Koefisien bertanda negatif artinya indikasi korupsi lebih rendah pada tahun politik.

Pembahasan

Pengaruh Diskresi terhadap Indikasi Korupsi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi yang diproksikan dengan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi, sehingga hipotesis (H_1) yang menyatakan diskresi berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia diterima. Hasil uji regresi pengaruh desentralisasi fiskal

terhadap indikasi korupsi dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Fisman dan Gatti (2002), Tumennasan (2005), Gurgur dan Shah (2005) serta Peralis Romero dan Usabiaga (2013). Pemberian wewenang melalui desentralisasi fiskal mungkin dapat mendekatkan pemerintah pusat dengan masyarakat di daerah, namun jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran pejabat publik dan pengendalian intern yang memadai maka akan menjadikan penyelewengan dalam bentuk korupsi susah dihindari. Selain itu ketiadaan dukungan SDM akan menyebabkan meningkatnya potensi korupsi dari pusat ke daerah.

Pengaruh Afiliasi Politik terhadap Indikasi Korupsi

Hasil penelitian diketahui bahwa afiliasi politik tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi, sehingga hipotesis (H_2) yang menyatakan bahwa afiliasi partai politik berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan partai politik sudah cukup baik sehingga tidak terlalu membebani kepala daerah. Jika kepala daerah terlalu terbebani dengan tanggung jawab keuangan partai politik maka akan meningkatkan potensi mereka untuk melakukan korupsi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rumesten (2014), Fitriyah (2011), Tanzi (2002) dan Lederman (2005) juga menunjukkan bahwa monopoli politik pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap korupsi. Tanzi (2002) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab langsung dari korupsi adalah karena partai politik pendukung membutuhkan biaya yang harus ditanggung calon kepala daerah. Fitriyah (2011) menyatakan bahwa korupsi yang dilakukan kepala daerah dipengaruhi oleh partai politik.

Pengaruh Dinasti Politik terhadap Indikasi Korupsi

Hasil penelitian diketahui bahwa dinasti politik berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi, sehingga hipotesis (H_3) yang menyatakan bahwa dinasti politik berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa dinasti politik semakin membuka peluang dan memperbesar potensi terjadinya korupsi (kpk.go.id, diakses 7 maret 2018). Dalam pandangan Alhumami (2016), peneliti sosial di University of Sussex Inggris politik kekerabatan atau dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi karena perekrutan kader tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan sentimen kekeluargaan. Menurutnya gejala ini pada akhirnya akan membuat potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi akan meningkat.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Indikasi Korupsi

Hasil penelitian diketahui bahwa dinasti politik berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi, sehingga hipotesis (H_4) yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Javaid (2010) dalam penelitiannya di Pakistan yang menyatakan bahwa sebesar 31,68 % korupsi yang terjadi di Pakistan disebabkan lemahnya akuntabilitas. Penelitian Olken (2007) menyatakan bahwa fungsi akuntabilitas di pemerintahan dapat meminimalisir tindak korupsi. Menurut Brewer (2007) bahwa efektifitas pemerintah akan meningkat apabila terdapat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sehingga korupsi dapat dikendalikan. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban yang berupa pelaporan atas kinerja pemerintah daerah. Dengan akuntabilitas diharapkan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan

daerah atau korupsi akan menurun.

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Indikasi Korupsi

Hasil penelitian, ada pengaruh positif tingkat ekonomi terhadap indikasi korupsi. Berdasarkan hasil tersebut semakin besar tingkat ekonomi maka akan semakin besar pula indikasi korupsi demikian pula sebaliknya. Tindakan korupsi mencerminkan kualitas suatu lembaga. Kualitas lembaga dipengaruhi beberapa faktor yang salah satunya adalah tingkat ekonomi. Dengan kondisi ekonomi yang baik akan memunculkan budaya kritis yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan budaya masyarakat dalam menanggapi kinerja pemerintah.

Hasil uji terdapat pengaruh negatif tahun pilkada terhadap indikasi korupsi. Berdasarkan hasil tersebut pada tahun pilkada indikasi korupsi lebih kecil dibandingkan dengan tahun lainnya. Hal ini disebabkan pada tahun pilkada kepala daerah membutuhkan pencitraan sehingga cenderung untuk menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya untuk menarik dukungan dari masyarakat. Sebaliknya sebelum tahun pilkada, indikasi korupsi cenderung lebih tinggi karena untuk mengumpulkan modal biaya politik pada tahun pilkada khususnya inkumben untuk mencalonkan kembali menjadi kepala daerah. Besarnya biaya politik untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah mendorong kepala daerah untuk berusaha mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, salah satu caranya dengan melakukan korupsi.

Pengujian Tambahan

Penelitian ini terdapat beberapa pengujian tambahan yaitu pengujian dibedakan atas dua pengelompokan yaitu Jawa dan Luar Jawa. Pemilihan pengelompokan atas Jawa dan luar Jawa dengan pertimbangan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa cenderung lebih maju daripada di luar Jawa dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan pengujian. Pengujian tambahan yang terakhir adalah dibedakan atas dua pengelompokan yaitu Kabupaten/Kota pemekaran dan bukan pemekaran. Pemilihan pengelompokan ini atas dasar Kabupaten/Kota bukan pemekaran (induk) telah lebih dulu berdiri daripada pemekaran sehingga cenderung lebih maju secara infrastruktur dan pendidikan, namun di sisi lain juga cenderung lebih besar adanya dinasti politik karena kekuasaan yang sudah turun temurun. Hasil pengujian tambahan Jawa dan luar Jawa serta pemekaran dan bukan pemekaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Uji Hipotesis Tambahan

VARIABLE	JAWA	LUAR JAWA	PEMEKARAN	BUKAN PEMEKARAN
A	4,061	3,006	2,834	3,149
Desentralisasi Fiskal	-1,222*** (0,000)	0,392*** (0,002)	0,451** (0,011)	0,200 (0,146)
Afiliasi Politik	0,000 (0,463)	0,000 (0,338)	0,003*** (0,004)	-0,001 (0,171)
Dinasti Politik	0,289** (0,047)	0,017 (0,299)	0,005 (0,405)	0,183** (0,029)
Akuntabilitas	-0,002 (0,330)	-0,006*** (0,000)	-0,003** (0,011)	-0,006*** (0,000)

Tingkat Ekonomi	0,002*	0,002***	0,000**	0,003***
	(0,056)	(0,000)	(0,036)	(0,000)
Tahun Politik	-0,100***	-0,050**	-0,023**	-0,079***
	(0,000)	(0,039)	(0,019)	(0,001)
F-Test	2,321	4,412	1,377	4,934
Prob	0,033	0,000	0,111	0,000
Ajusted R2	0,029	0,025	0,006	0,033
Observasi (N)	271	811	383	703

Sumber : Hasil olahan data

Keterangan : *,**,*** Signifikan pada 10%, 5%, 1%

Pengujian pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Luar Jawa

Pengujian pada tabel 6 desentralisasi fiskal di Pulau Jawa berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi, namun di luar Jawa desentralisasi berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal di Pulau Jawa lebih efektif dibandingkan dengan luar Jawa. Di Pulau Jawa desentralisasi membuat pemerintah menjadi lebih dekat dengan rakyat sehingga terbentuk manajemen fiskal yang lebih bertanggung jawab. Desentralisasi fiskal sebagai strategi yang efektif karena pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah lokal yang notabene lebih tahu kebutuhan dan kondisi daerah sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Afiliasi politik di Pulau Jawa maupun luar Jawa tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rumesten (2014), Karlström (2015), Fitriyah (2011), Tanzi (2002) dan Lederman (2005) juga menunjukkan bahwa monopoli politik pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap korupsi.

Di Pulau Jawa dinasti politik berpengaruh positif dan terhadap indikasi korupsi, namun diluar Jawa tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi. Dinasti politik cenderung lebih besar terjadi di Pulau Jawa, sehingga indikasi korupsi di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan pulau yang lain. Hal ini disebabkan tingginya APBD serta kuatnya politik kekeluargaan yang mendominasi pada pemerintah Kabupaten/Kota secara turun temurun di Pulau Jawa. Dalam pandangan Amich Alhumami (2016), politik kekerabatan atau dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi karena proses rekrutmen tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan faktor kekerabatan. Menurutnya, gejala ini pada akhirnya akan meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Akuntabilitas di Pulau Jawa tidak berpengaruh, sedangkan di luar Pulau Jawa berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban yang berupa pelaporan atas kinerja pemerintah daerah. Dengan akuntabilitas diharapkan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan daerah atau korupsi akan menurun.

Pengujian pada Kabupaten/Kota Pemekaran dan Bukan Pemekaran

Pengujian pada tabel 6 desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota pemekaran berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi, namun pada Kabupaten/Kota yang bukan pemekaran desentralisasi tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi. Hal ini

menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal pada Kabupaten/Kota induk lebih efektif dibandingkan dengan Kabupaten/Kota pemekaran. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemekaran yang selama ini dilakukan belum didukung kesiapan SDM yang memadai serta kurang siapnya pemerintahan baru bentukan dari pemekaran. Pada Kabupaten/Kota Induk desentralisasi membuat pemerintah menjadi lebih dekat dengan rakyat sehingga terbentuk manajemen fiskal yang lebih bertanggung jawab. Desentralisasi fiskal sebagai strategi yang efektif karena pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah lokal yang notabene lebih tahu kebutuhan dan kondisi daerah sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Afiliasi politik pada Kabupaten/Kota pemekaran berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi, sedangkan pada Kabupaten/Kota Induk tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada kabupaten pemekaran yang cenderung baru terbentuk, afiliasi politik sangat berpengaruh terhadap indikasi korupsi hal ini disebabkan dominasi kepentingan politik dalam pembentukan daerah yang tinggi. Dinasti politik pada Kabupaten/Kota induk berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi, sedangkan pada Kabupaten/Kota pemekaran tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa pada Kabupaten/Kota induk yang cenderung sudah lama terbentuk cenderung terdapat dinasti politik yang mendominasi kekuasaan secara turun temurun sehingga berpengaruh terhadap indikasi korupsi. Untuk mempertahankan kekuasaan dinasti politik dibutuhkan biaya yang besar, sehingga dinasti politik cenderung akan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu unsur kekerabatan juga mengakibatkan korupsi lebih mudah dilakukan sehingga indikasi korupsi pada daerah yang terdapat dinasti politik cenderung lebih tinggi.

Akuntabilitas di Kabupaten/Kota induk maupun pemekaran berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa baik pada daerah pemekaran maupun induk efektif untuk mencegah korupsi. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban yang berupa pelaporan atas kinerja pemerintah daerah. Dengan akuntabilitas diharapkan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan daerah atau korupsi akan menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah desentralisasi fiskal, afiliasi politik, dinasti politik dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol tingkat ekonomi dan tahun politik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Afiliasi politik tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dinasti politik berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pengukuran variabel indikasi korupsi hanya menggunakan temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan

kekurangan penerimaan. Pengukuran indikasi korupsi dalam penelitian ini belum memasukan temuan temuan yang mengandung kelemahan administrasi, ketidakefektifan, ketidakhematan dan ketidakefisienan. Nilai *adjusted R²* dalam penelitian ini masih relatif kecil, sehingga masih ada faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian tersebut, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan kelemahan administrasi, ketidakefektifan, ketidakhematan dan ketidakefisienan dalam pengukuran indikasi korupsi. Sebaiknya menambahkan faktor-faktor lain seperti komitmen pimpinan, pengendalian internal dan kultur budaya yang mungkin lebih bisa menjelaskan tingkat keterjadian indikasi korupsi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E., dan Tanzi, V. 2002. *Managing Fiscal Decentralization: Overview*, pp. 1-13, London : Routledge
- Alhumami, A, 2016, dalam www.akbarfaizal.com, diakses tanggal 24 Mei 2018.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2013-2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2013- 2016*. Jakarta: BPK RI
- Brewer, G. A; Choi, Y; dan Walker, R. M.2007. Accountability, Corruption end Government Effectiveness in Asia : An Expolration of World Bank Governance Indicators. *International Public Management Review, Electronic Journal*, Vol.8, Issue 2
- Djarwanto. 2000. *Mengenal Beberapa Uji Statistik Dalam Penelitian*. Jakarta: Liberty.
- Fisman, R., dan Gatti, R. 2002. Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries. *Journal of Public Economics*, 83 : 325 - 345
- Gerring, J. dan Thacker, S. 2005. Do Neoliberal Policies Deter Political Corruption? *International Organization*, 59 : 233-254
- Gurgur, T., dan Anwar, T. 2005. Localization and corruption panacea or Pandora's Box ?. *World Bank Policy Research Working Paper* 3486
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07000031/hingga-september-2017-5-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka?page=all> Selasa, 19 September 2017 (Diakses 3 Februari 2018)
- <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/22153381/kpk-kalau-biaya-politik-mahal-kep-ala-daerah-berisiko-lakukan-korupsi> Jumat, 12 Januari 2018. (Diakses 6 Februari 2018)
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/08153641/belum-genap-2-bulan-tahun-2018-tujuh-kepala-daerah-jadi-tersangka-kpk> Kamis, 15 Februari 2018 (Diakses 8 Maret 2018)
- <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/79-berita/berita-media/2808-dinasti-politik-besarkan-potensi-korupsi> Jumat, 10 Juli 2015 (Diakses 7 Maret 2018)
- Javaid, U. 2010. Corruption and is deep impact on good governance in Pakistan. *Pakistan Economic And Sosial Review*, Volume 48, No. 1, Summer, 123 - 134
- Kaufmann, D. 2005. Myths and realities of governance and corruption. *World Bank Governance Program*
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2015. *Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013-2015*. <https://www.menpan.go.id/site/>. Diakses Februari 2018

- Klitgaard, R. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Klitgaard, R. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kurniawan, T. 2017. *Isu Diskresi dalam Kasus Korupsi Kepala Daerah Yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Disertasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Kurniawati, F. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikasi Korupsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- Lederman, D; Loayza, N; dan Soares, R.R. 2001. *Accountability and Political Institutions Matter*. World Bank Working Paper No. 2708
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN
- Nur, A. 2015. *Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Nurcholis, A. 2016. *Orang Kuat dalam Dinamika Politik Lokal*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I.XIII.2/8/2010 Tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. 2014. *Data Perolehan Kursi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Legislatif 2014*. <http://www.puskapol.ui.ac.id/legislatif-2014>. Diakses Februari 2018
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Ribot, J. C., Agrawal, A., & Larson, A. M. 2006. Recentralizing While Decentralizing: How National Governments Reappropriate Forest Resources. *World Development*, 34(11), 1864-1886.
- Rumesten, I. 2014. Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2, 17-36. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/302/282>. Diakses Februari 2018
- Sastroatmodjo, S. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Setiawan, W. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Tanzi, V. 2002. *Corruption Around the World: Causes, Consequencws, Scope, and Course*, in *Governance, Corruption, Economic Performance*. Washington: International Monetary Fund
- Tippett, J., & Kluvers, R. 2010. Accountability and Information in Local Government Tippett & Kluvers, 2(3), 22-33.
- Transparency International Indonesia (TII). 2015. *Survei Persepsi Korupsi 2015*. Jakarta: Danish Royal Embassy
- Treisman, D. 2000. The Causes of Corruption : a Cross National Study. *Journal of Public*

Economics 76 : 399 - 457

Tumennasan, B. 2005. *Fiscal Decentralization and Corruption in the Public Sector*.
Disertasi, Andrew Young School of Policy Studies of Georgia State University.

Zhang, T. dan Zou H. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic
Growth in China. *Journal of Public Economics* 67, 221-240